

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM KAWASAN SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H.

Dr. Lucky Respati, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

No. Reg: 37/PK-IV/IV/2026

	No. Alumni Universitas	Vabelino Bastian	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 12 September 2003 b. Nama Orangtua : Bastian c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210112061	f. Tanggal Lulus : 11 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,73 j. Alamat : Koto Tengah, Padang.	

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
DALAM KAWASAN SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI**

Vabelino Bastian, 2210112061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Khusus Hukum Pidana (PK IV), Halaman Tahun 2026, Pembimbing Efren Nova, S.H., M.H. dan Dr. Lucky Respati, S.H., M.H.

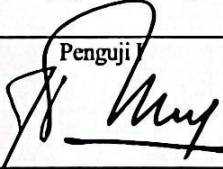
ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan dari barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum, kendala, serta upaya penanganannya dalam perkara penadahan kendaraan bermotor yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) di Polres Merangin Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, bersumber dari wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Merangin serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan formal sering mengalami jalan buntu akibat benturan budaya. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus menyimpang menjadi mediasi transaksional bawah tangan berupa pelegalan uang tebus yang mendegradasi esensi Keadilan Restoratif Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh hambatan sistemik dari lima faktor Soerjono Soekanto, meliputi ketakutan asas fiksi hukum, keterbatasan taktis aparat, ketiadaan SOP razia perimeter, perlawanan sosiologis, hingga kawasan adat yang menjadi zona kebal hukum bagi jaringan kendaraan gelap. Sebagai upaya penanganan, dirumuskan SOP taktis untuk memilah subjek perkara: pendekatan persuasif bagi warga adat yang murni korban penipuan luar, serta tindakan represif tanpa kompromi lewat razia dan penyekatan jika terbukti ada niat jahat (*mens rea*) berupa *willful blindness*, pemalsuan dokumen, atau pemerasan. Kesimpulannya, inefektivitas proses hukum akibat kelumpuhan taktis dan mediasi bawah tangan menuntut ketegasan hukum formal yang dibarengi pendekatan sosial-budaya demi menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana Penadahan, Suku Anak Dalam, Diskresi, Polres Merangin.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 11 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Vabelino Bastian	Dr. Yoserwan, S.H., M.H. LLM	Felia Hermayenti, S.H., M.H

Mengetahui.

Ketua Departemen Hukum Pidana : Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Vabelino Bastian	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Solok /12 th September 2003 b. Parent's Name : Bastian c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210112061		f. Graduation Date : 11 th August 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years i. GPA : 3,73 j. Address : Koto Tangah, Padang.

**LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST THE CRIME OF RECEIVING STOLEN GOODS
WITHIN THE SUKU ANAK DALAM INDIGENOUS TERRITORY, JAMBI PROVINCE**

Vabelino Bastian, 2210112061, Faculty of Law, Andalas University, Special Program in Criminal Law (PK IV), Year Page 2026, Supervisor Efren Nova, S.H., M.H. and Dr. Lucky Respati, S.H., M.H.

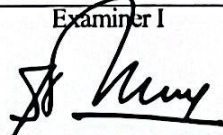
ABSTRACT

The crime of fencing is the act of buying, renting, exchanging, accepting as a pledge, or profiting from goods reasonably suspected to originate from a criminal offense, as regulated under Article 591 of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. This study aims to analyze the implementation of law enforcement, obstacles encountered, and handling efforts regarding motor vehicle fencing cases involving the Suku Anak Dalam (SAD) indigenous community at the Merangin Resort Police, Jambi. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical design, utilizing primary data from interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Merangin Resort Police alongside a literature review. The findings indicate that formal investigations frequently reach a deadlock due to cultural clashes. In practice, the resolution of these cases often deviates into under-the-table transactional mediation manifested as the legalization of vehicle ransom payments which degrades the core essence of Restorative Justice as mandated by Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021. This condition is driven by systemic impediments across Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness, including the rigidity of the national legal fiction principle, investigators' tactical limitations, the absence of standardized perimeter raid SOPs, sociological resistance, and the transformation of customary territories into lawless safe zones for illicit vehicle syndicates. As a mitigation effort, strict tactical SOPs are formulated to classify case subjects: applying a persuasive approach for indigenous members who are genuinely victims of external deception, and executing uncompromising repressive law enforcement through border blockades and periodic raids if criminal intent (*mens rea*) is detected in the form of willful blindness, document forgery, or ransom extortion. In conclusion, the ineffectiveness of the legal process due to tactical paralysis and informal mediation demands a firm application of formal law coupled with a localized socio-cultural approach to achieve equitable legal certainty.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Investigation, Receiving Stolen Goods, Suku Anak Dalam, Discretion, Merangin Regional Police.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at , August 11th 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Vabelino Bastian	Dr. Yoserwan, S.H., M.H. LLM	Fella Hermayenti, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: